

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya menjawab tantangan global abad ke-21, pendidikan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan individu yang cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab etis, dan kemampuan mengambil keputusan dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks. Laporan dari UNESCO (2017), menegaskan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau *Education for Sustainable Development Goals* (ESDGs) harus mencakup integrasi nilai-nilai seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan budaya keberagaman ke dalam proses pembelajaran. Secara khusus, Target 4.7 dari ESDGs menyatakan bahwa peserta didik perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui promosi budaya damai dan kewarganegaraan global.

Sejalan dengan itu, laporan OECD (2023), menekankan bahwa pemecahan masalah kompleks merupakan kompetensi inti yang sangat dibutuhkan dalam dunia modern. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan individu untuk mengambil keputusan dalam konteks yang tidak pasti, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan situasi nyata. Kompetensi semacam ini tidak dapat diukur hanya melalui asesmen konvensional, tetapi memerlukan pendekatan penilaian dengan melibatkan serangkaian keputusan kognitif yang bersifat reflektif dan kontekstual.

Di Indonesia, pengembangan kompetensi berbasis nilai-nilai memperoleh landasannya pada Pancasila sebagai fundamen moral kehidupan berbangsa (Hatta, 1977). Namun data menunjukkan sebaliknya. Setara Institute (2023), menyampaikan laporan survei tingkat toleransi siswa SMA Tahun 2023, hasilnya menunjukkan sebagian remaja yang sebelumnya termasuk dalam kategori intoleran pasif mengalami perubahan menjadi intoleran aktif, sebagaimana terlihat dari peningkatan angka dari 2,4% pada tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2023. Kategori remaja yang terpapar juga menunjukkan tren kenaikan, dari 0,3% menjadi 0,6%. Selain itu, survei ini mengidentifikasi lima faktor yang berkontribusi terhadap sikap toleransi atau intoleransi di kalangan remaja, yaitu pemahaman

tentang wawasan kebangsaan, frekuensi penggunaan media sosial, kegiatan harian, sikap terhadap agama, serta kondisi sosial ekonomi.

Tidak hanya di kalangan remaja, tantangan serupa juga ditemukan pada profesi guru sebagai aktor utama pendidikan. Survei nasional yang dilakukan PPIM UIN Jakarta bersama UNDP Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan tingkat intoleransi yang cukup mengkhawatirkan di kalangan guru. Sebanyak 69,3 persen guru menunjukkan intoleransi internal terhadap kelompok yang berbeda. Selain itu, 28,10 persen guru secara tegas menolak keberadaan kelompok tertentu yang dianggap menyimpang, dan lebih dari separuh responden menyatakan keberatan apabila pemerintah mengakui kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah (PPIM UIN Jakarta & UNDP Indonesia, 2018). Temuan ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam sensitivitas moral dan penilaian etis guru, yang berpotensi memengaruhi interaksi pedagogis, pengambilan keputusan di kelas, serta pembentukan lingkungan sekolah yang inklusif.

Kondisi yang digambarkan oleh data empiris tersebut, didukung oleh berbagai hasil kajian. Pancasila sempat mengalami delegitimasi pasca-reformasi akibat meningkatnya kontestasi ideologi dan radikalisme wacana politik (Bourchier, 2019). Ini mengakibatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila semakin melemah sehingga memberikan ruang bagi tumbuhnya radikalisme di kalangan generasi muda (Winarni, 2020). Fakta ini didukung oleh Nuryadi & Widiatmaka (2022), yang menyatakan bahwa mahasiswa menjadi target utama kelompok radikal karena idealisme, semangat perubahan, dan kerentanan emosional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sumaryati & Sukmayadi (2021), menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memahami posisi Pancasila sebagai dasar negara, namun implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dinilai kurang optimal. Pancasila dideklarasikan sebatas pada nilai-nilai luhur yang bersifat deklaratif, namun belum menyentuh aspek reflektif dan aplikatif.

Temuan penelitian Lestari et al. (2021) dan Primahendra et al. (2020), menunjukkan bahwa penguatan komitmen serta sikap terhadap ideologi Pancasila lebih efektif apabila pendidikan politik, kewarganegaraan, dan Pancasila diarahkan pada pembentukan kesadaran moral dan sosial, bukan sebatas penanaman pandangan tentang kepemimpinan politik. Hal ini sejalan dengan penegasan dari

Bung Hatta, menurutnya diperlukan pendidikan yang menanamkan Pancasila sebagai pedoman yang diamalkan melalui tindakan nyata, bukan hanya diucapkan atau dihafalkan (Hatta & Yazni, 1980). Dalam konteks pendidikan, penguatan dasar moral seperti nilai-nilai Pancasila tidak mungkin dilepaskan dari peran strategis guru sebagai figur sentral dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Perubahan global dan berbagai krisis kontemporer menempatkan profesi guru pada posisi strategis sebagai penjaga nilai moral peserta didik. Dalam perspektif Tirri (2023), peran tersebut menuntut kemandirian moral, kemampuan menghadapi dilema etis secara adil, serta keteguhan dalam menjunjung prinsip-prinsip etik. Pencapaian ideal ini bergantung pada kompetensi moral yang mencakup kepekaan terhadap isu etis, dorongan intrinsik untuk bertindak benar, dan kecakapan mengintegrasikan nilai moral ke dalam proses pembelajaran. Realitas menunjukkan bahwa tanggung jawab strategis tersebut belum sepenuhnya terdukung oleh kualitas sistem pelatihan yang tersedia.

Ketiadaan penekanan sistematis pada dimensi etika dalam pendidikan guru masa kini seringkali menyebabkan lulusan memasuki dunia kerja tanpa landasan moral yang kokoh. Dalam analisis Ozturk (2025), persoalan ini menuntut perluasan definisi pengetahuan profesional guru melalui integrasi komponen pengetahuan etis. Ranah etis yang dimaksud mencakup pertimbangan moral dalam praktik pedagogis, kepekaan etik yang berkaitan dengan karakteristik mata pelajaran, serta pemahaman pedagogis yang menopang pendidikan karakter. Pengembangan kerangka tersebut bertujuan membentuk kesiapan etis calon guru agar mampu merumuskan keputusan yang adil dan proporsional dalam situasi kelas yang kompleks, sekaligus mengambil peran aktif dalam pembentukan karakter peserta didik dan penguatan moralitas profesi keguruan.

Kecenderungan serupa ditemukan dalam studi naratif Joseph (2016), yang mengungkap bahwa guru maupun calon guru memiliki kesadaran tinggi mengenai posisi moralitas dalam profesi mereka dan menunjukkan aspirasi untuk menjadi teladan etis. Tantangan utama justru terletak pada keterbatasan mereka dalam mengartikulasikan pemikiran moral yang kompleks serta melakukan refleksi kritis terhadap persoalan-persoalan etis yang muncul dalam praktik pendidikan. Selain

itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan guru sering mengesampingkan dimensi moral. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran moral instrinsik yang dimiliki oleh para guru, seringkali tidak mendapatkan ruang pengembangan formal untuk mendorong pembentukan identitas etis mereka sebagai pendidik. Berbagai temuan ini, secara konsisten menekankan bahwa penguatan peran moral guru memerlukan intervensi pendidikan yang eksplisit, sistematis, dan kontekstual, termasuk melalui pelatihan-pelatihan yang secara langsung menyasar pengembangan karakter berbasis nilai-nilai moral.

Di Indonesia, salah satu bentuk intervensi sistemik yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, sasaran Diklat PIP mencakup aparatur negara, anggota organisasi kemasyarakatan, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka. Dalam kerangka tersebut, posisi guru sudah tercakup di dalamnya. Guru ASN berada pada kategori aparatur negara. Guru non-ASN yang mengikuti organisasi profesi dapat diposisikan sebagai anggota organisasi kemasyarakatan. Guru non-ASN yang tidak terafiliasi secara kelembagaan termasuk dalam kelompok komponen masyarakat lainnya. Secara lebih eksplisit, dalam dokumen Keputusan Kepala BPIP Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Cetak Biru Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, dituliskan bahwa profesi guru merupakan sasaran prioritas dari Diklat PIP.

Tujuan Diklat PIP yang tercantum pada Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar peserta memiliki pengetahuan, disposisi berupa sikap, komitmen dan keyakinan, serta tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknis perencanaan sampai penilaian Diklat PIP, dijelaskan melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Standar Dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila. Perencanaan programnya disusun secara sistematis melalui penetapan kurikulum, pengaturan alur pembelajaran, pemilihan pengajar serta penetapan mekanisme pendampingan peserta. Metode pembelajarannya dilaksanakan melalui klasikal atau daring yang

dipadukan dengan pembukaan melalui ikrar kesetiaan terhadap Pancasila, penyampaian materi, penugasan aktualisasi dan sesi refleksi bersama instruktur. Materi yang diberikan mencakup dimensi historis, filosofis dan aplikatif Pancasila melalui muatan sejarah Pancasila, pokok-pokok pikiran, kedudukan, demokrasi, sistem ekonomi, serta pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sistem penilaiannya mencakup aspek pengetahuan melalui *pre-test* dan *post-test*, aspek disposisi melalui penyusunan rencana aktualisasi, dan aspek tindakan melalui laporan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Program Diklat PIP terutama dalam rumusan tujuannya, menyebutkan kecerdasan karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Konsep karakter dalam kerangka psikologi moral James Rest melalui *Four Component Model* (FCM), menegaskan bahwa perilaku moral lahir dari empat proses yang saling berkaitan yaitu *moral sensitivity*, *moral judgment*, *moral motivation*, dan *moral character*. Karakter moral atau *moral character* menjadi komponen yang memastikan penilaian moral diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga moralitas tidak berhenti pada ranah kognitif semata (Rogers & Breakey, 2023). Perspektif ini kemudian diperluas oleh Thomas Lickona melalui gagasan pendidikan karakter, yang menekankan integrasi antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*, sehingga karakter tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertindak sesuai penilaian moral, tetapi juga sebagai hasil pendidikan yang menyatukan pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral dalam kehidupan sehari-hari (Izzati et al., 2019).

Inti dari pendidikan karakter terletak pada proses pembelajaran, maka relevan untuk melihat gagasan Georg Lind tentang *moral competence*, yang menekankan bahwa moralitas merupakan keterampilan deliberatif yang dapat diukur dan ditingkatkan melalui pembelajaran. Melalui instrumen *Moral Competence Test* (MCT) dan metode *Konstanz Method of Dilemma Discussion* (KMDD), Lind menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat menjadi wahana konkret untuk mengembangkan kemampuan warga negara dalam menyelesaikan dilema moral secara rasional dan konsisten (Lind, 2019). Kerangka ini menunjukkan bahwa tujuan Diklat PIP ini sebenarnya mengarah pada penguatan kompetensi moral Pancasila sebagai fundamen karakter bangsa.

Kerangka tersebut membawa konsekuensi strategis bagi profesi guru sebagai salah satu sasaran prioritas Diklat PIP. Tujuan program yang diarahkan pada penguatan kompetensi moral Pancasila menuntut penempatan guru bukan sebagai peserta administratif, melainkan sebagai aktor kunci yang menentukan keberhasilan internalisasi nilai di ruang kelas. Otoritas moral seorang guru tidak cukup diukur melalui kemampuan menyampaikan nilai secara deklaratif, melainkan melalui konsistensi pengambilan keputusan etis dalam situasi dilema moral. Kredibilitas etis inilah yang dalam berbagai kajian terbukti menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan karakter. Palunga & Marzuki (2017), menyatakan bahwa pembelajaran karakter hanya berdampak transformatif ketika guru hadir sebagai teladan moral dalam tindakan. Selain itu, Utami et al. (2021), menegaskan bahwa kredibilitas guru lebih banyak dipengaruhi integritas personal dan kematangan moral dibandingkan penguasaan materi ajar. Temuan serupa dalam kajian cinta kasih guru menjelaskan bahwa relasi edukatif yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat peserta didik memungkinkan nilai Pancasila hadir sebagai pengalaman emosional, bukan wacana abstrak (Sukodoyo, 2018). Upaya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum pun terbukti stagnan ketika guru tidak memiliki kerangka nilai yang terinternalisasi secara reflektif (Marzuki, 2018). Berbagai temuan ini menegaskan bahwa kompetensi moral Pancasila tidak dapat diposisikan sebagai atribut tambahan, melainkan sebagai prasyarat yang menentukan legitimasi sosial guru sebagai pendidik.

Kerangka kompetensi moral Pancasila yang diposisikan sebagai prasyarat etik profesi guru tentu membutuhkan mekanisme pembinaan dan evaluasi yang mampu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut terinternalisasi secara reflektif. Pencapaian tujuan Diklat PIP, tidak dapat bergantung pada penyampaian materi dan deklarasi nilai semata. Proses pembelajaran kompetensi moral Pancasila, memerlukan sistem evaluasi yang mampu menangkap cara peserta menimbang alternatif tindakan dan memberikan alasan etis ketika dihadapkan pada situasi dilematis. Penilaian aspek disposisi melalui rencana aktualisasi masih bertumpu pada pernyataan komitmen pribadi tanpa memastikan bahwa komitmen tersebut lahir dari proses penalaran moral yang matang. Penilaian aspek tindakan melalui laporan aktualisasi belum menjamin bahwa tindakan yang dipilih merupakan hasil

refleksi etis melainkan dapat muncul sebagai penyesuaian terhadap ekspektasi institusional. Ketiadaan instrumen yang dapat menangkap informasi mengenai kompetensi moral Pancasila dari peserta, menyebabkan penguatan kecerdasan karakter yang menjadi tujuan utama Diklat PIP tidak dapat diverifikasi secara substantif.

Berbagai instrumen pengukuran moral telah dikembangkan secara internasional. Instrumen pengukuran moral yang berakar pada teori perkembangan kognitif moral Kohlberg diantaranya yaitu *Moral Dilemma Questionnaire*, *Defining Issues Test* (DIT), *Moral Judgment Test* (MJT) dan *Moral Competence Test* (MCT). *Moral Dilemma Questionnaire* merupakan instrumen pengukuran moral dengan bentuk wawancara, yang pertama kali diusulkan oleh Kohlberg (Arslan, 2021). DIT dan versi terbarunya DIT-2, merupakan instrumen yang dikembangkan oleh James Rest, dengan bentuk serangkaian cerita dilema moral, diikuti oleh sejumlah pertanyaan yang harus dinilai dan diurutkan berdasarkan seberapa pentingnya oleh responden. Pertanyaan tersebut terkait dengan tahapan perkembangan moral tertentu (Agrawal et al., 2020; Choi et al., 2020; Rest et al., 2000; van den Enden et al., 2019). MJT dan MCT, merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lind. Pada awalnya Lind mengembangkan instrumen MJT dengan bentuk serangkaian cerita dilema moral yang diikuti oleh sejumlah argumen yang harus dinilai berdasarkan penerimaannya oleh responden. Argumen tersebut terkait dengan tahapan perkembangan moral tertentu (Reinicke, 2017). Kemudian Lind (2019), memperbaharui MJT menjadi MCT, dengan bentuk dua cerita dilema moral, diikuti sejumlah argumen pro dan kontra yang harus dinilai berdasarkan penerimaannya oleh responden (Kriaučiūniene & Lind, 2021a; Miranda-Rodríguez et al., 2023a).

Selain instrumen yang berakar pada perkembangan moral kognitif, instrumen lainnya seperti *Moral Competency Inventory* (MCI) dan *Moral Foundations Questionnaire* (MFQ) dikembangkan berdasarkan prinsip atau nilai-nilai universal. MCI merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lennick & Kiel (2011), berbentuk kuisioner dengan skala frekuensi, yang menilai sejauh mana individu menunjukkan perilaku sesuai prinsip-prinsip moral universal (Letić & Lungulov, 2020; Mohammadi et al., 2020; Toprak & Karakus, 2018; Winurini, 2019). Di Indonesia, penelitian Nurcahya et al. (2025), mengusulkan tambahan

dimensi MCI berbasis Pancasila, namun masih memerlukan pengujian validitas konstruk lebih lanjut karena dalam pengembangannya belum menyertakan seluruh dimensi asli dari MCI. MFQ dan versi terbarunya MFQ-2 merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Haidt, berbentuk kuisioner yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menilai tingkat relevansi dari suatu pertimbangan untuk memutuskan benar dan salah. Bagian kedua menilai tingkat persetujuan dari suatu pernyataan. Pertimbangan dan pernyataan tersebut berkaitan dengan pondasi moral yang diklaim bersifat universal (Ciuk, 2018; Dogruyol et al., 2024; Iurino & Saucier, 2020; Nilsson, 2023; Wormley et al., 2023). Semua instrumen pengukuran moral yang telah dikembangkan belum ada yang secara eksplisit mengukur moral Pancasila.

Di sisi lain, sejumlah instrumen telah dikembangkan di Indonesia untuk mengukur nilai-nilai Pancasila. Sebagian besar instrumen mengacu pada karakter atau profil pelajar Pancasila. Suhendi et al. (2021) mengembangkan instrumen survei karakter berbasis profil pelajar Pancasila berbentuk kuisioner dengan skala tingkat kesesuaian. Supramono & Hidayati (2023), mengembangkan instrumen penilaian karakter berbasis profil pelajar Pancasila berbentuk *self-assessment* dengan skala sikap. Mistiani et al. (2024), mengembangkan instrumen penilaian karakter berbasis profil pelajar Pancasila berbentuk kuisioner dengan skala sikap. Rachman et al. (2024), mengembangkan kuisioner untuk mengukur preferensi tema proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila pada siswa SMP. Sedangkan, Ridwan et al. (2025), mengembangkan instrumen survei lingkungan belajar berbasis profil pelajar Pancasila berbentuk inventori dengan skala sikap dan skala perilaku. Sementara itu, Revalina et al. (2023) menggunakan instrumen wawancara yang dikembangkan berdasarkan indikator nilai-nilai Pancasila untuk mengukur degradasi moral siswa SMP. Semua instrumen tersebut cenderung bersifat deskriptif atau deklaratif berdasarkan persepsi individu, tanpa menguji proses pengambilan keputusan dalam situasi dilema moral.

Bentuk instrumen yang mengintegrasikan persepsi individu dan konteks sosial adalah *Situational Judgment Test* (SJT) (Weekley & Ployhart, 2006). Instrumen ini telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk mengukur kompetensi yang terkait dengan perilaku profesional, moral, dan sosial. Misalnya,

Aldrup et al. (2020), mengembangkan TRUST untuk mengukur kompetensi sosial-emosional guru, khususnya regulasi emosi dan manajemen hubungan dalam situasi pengajaran. Fisher et al. (2021), menggunakan SJT untuk mendeteksi kecenderungan *moral disengagement* di tempat kerja, sebagai mekanisme pembenaran perilaku tidak etis. Littlepage et al. (2021), merancang Teamwork SJT guna menilai kemampuan individu dalam menerapkan proses kerja tim secara efektif di lingkungan kerja. Sementara itu, Delellis et al. (2023), mengusulkan PAD-S untuk menilai empati, profesionalisme, integritas, dan kemampuan memecahkan masalah. Smith et al. (2023) menggunakan SJT untuk mengevaluasi atribut profesional seperti empati, integritas, dan kerja sama pada mahasiswa. Kim & Hauenstein (2024), menggunakan SJT untuk mendeteksi sikap terhadap mikroagresi, sebagai bentuk pengukuran sensitivitas terhadap ketidakadilan sosial. Di Indonesia, Wahyuni et al. (2024), mengembangkan instrumen dengan bentuk SJT untuk mengukur profil pelajar Pancasila bagi siswa SMA. Perlu dicermati bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang secara eksplisit merancang SJT untuk mengukur kompetensi moral sebagai suatu konstruk yang utuh.

Dengan demikian, hingga saat ini belum tersedia instrumen yang secara eksplisit mengukur kompetensi moral Pancasila dalam bentuk SJT yang mencerminkan tantangan nyata. Penelitian ini merupakan upaya untuk menjawab kekosongan tersebut dengan mengembangkan instrumen kompetensi moral Pancasila dengan bentuk SJT bagi peserta Diklat PIP. Instrumen yang dikembangkan bertujuan untuk menggambarkan kemampuan individu dalam menghadapi dilema moral yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mencerminkan kedalaman refleksi moral dan kecakapan mengambil keputusan dalam konteks nyata.

Pemilihan bentuk *Situational Judgment Test* (SJT) untuk mengukur kompetensi moral Pancasila didasarkan pada kesamaan karakteristiknya dengan instrumen pengukuran moral yang telah mapan sebelumnya, seperti *Moral Dilemma Questionnaire*, *Defining Issues Test* (DIT), dan *Moral Competence Test* (MCT). Sama seperti instrumen-instrumen tersebut, SJT berangkat dari dilema sebagai stimulus, menilai proses pengambilan keputusan, serta menghubungkan aspek kognitif dengan kecenderungan tindakan nyata (Lievens & Motowidlo, 2016;

Weekley & Ployhart, 2006). Keunggulan SJT terletak pada sifatnya yang lebih aplikatif dan kontekstual, karena menyajikan skenario sosial yang menyerupai tantangan nyata yang dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta Diklat PIP yang berprofesi sebagai guru (Chao et al., 2020; Klassen & Kim, 2021). Selain itu, SJT juga selaras dengan konsep karakter sebagaimana model FCM dari James Rest dan cakupan pendidikan karakter menurut Lickona. Dalam SJT, peserta dituntut untuk memahami dilema (*moral knowing*), mempertimbangkan nilai (*moral feeling*), serta memilih tindakan (*moral action*). Lebih jauh lagi, SJT dapat dipandang sebagai bentuk operasional dari *Four Component Model* (FCM) James Rest, karena setiap skenario dilema menuntut peserta untuk menunjukkan *moral sensitivity* atau menyadari adanya konflik nilai, *moral judgment* atau menilai tindakan, *moral motivation* atau memprioritaskan nilai moral, dan *moral character* atau konsistensi mewujudkan keputusan moral dalam tindakan yang dipilih. Dengan demikian, SJT memiliki karakteristik yang sesuai dengan instrumen pengukuran moral yang sudah ada, sekaligus mencerminkan konstruksi moral dan karakter secara utuh, sehingga tepat digunakan untuk mengukur kompetensi moral Pancasila dalam konteks Diklat PIP.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengembangan instrumen kompetensi moral Pancasila dengan bentuk *Situational Judgment Test* (SJT) bagi peserta Diklat PIP yang berprofesi sebagai guru. Fokus utama diarahkan pada:

1. Pengembangan instrumen kompetensi moral Pancasila dengan bentuk SJT yang mencakup penentuan konstruk yang diukur, perancangan skenario situasi dan opsi jawaban yang merepresentasikan nilai moral Pancasila dan relevan dengan konteks praktik keguruan.
2. Pengujian instrumen kompetensi moral Pancasila yang mencakup uji validitas konstruk dan estimasi reliabilitas.
3. Penyusunan panduan penskoran hasil pengukuran instrumen kompetensi moral Pancasila.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengembangan instrumen kompetensi moral Pancasila dengan bentuk SJT bagi peserta Diklat PIP yang berprofesi sebagai guru?
2. Bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen kompetensi moral Pancasila?
3. Bagaimana penskoran hasil pengukuran instrumen kompetensi moral Pancasila?

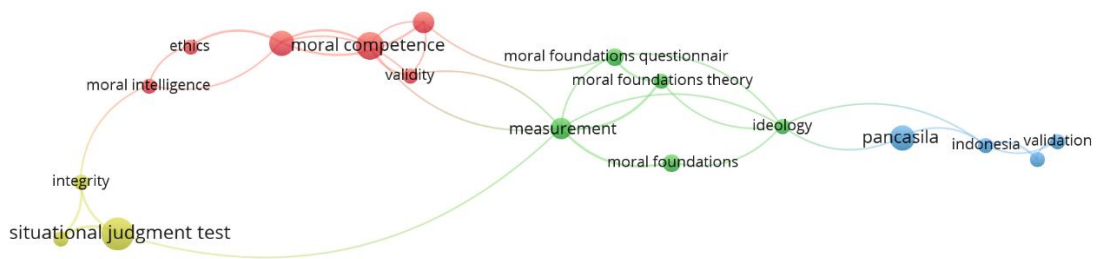
D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang relevan dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan instrumen kompetensi moral Pancasila dengan bentuk SJT yang dapat digunakan bagi peserta Diklat PIP yang berprofesi sebagai guru.
2. Memberikan dasar empiris mengenai validitas dan reliabilitas instrumen kompetensi moral Pancasila, sehingga instrumen yang dikembangkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis.
3. Menghasilkan panduan penskoran hasil pengukuran instrumen kompetensi moral Pancasila, berupa penskoran berdasarkan teori perkembangan moral dan hasil uji empiris, penentuan band atau kategori penilaian, dan laporan hasil pengukuran sehingga hasil pengukuran dapat diinterpretasikan secara tepat dalam konteks Diklat PIP.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang moral, Pancasila, dan SJT telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu 2015 – 2025, baik di tataran teori maupun pengembangan instrumen. Akan tetapi, tren global tersebut menunjukkan kecenderungan pemisahan antara ketiga domain tersebut. Untuk memperoleh pemetaan ilmiah atas keterhubungan ketiga domain tersebut, dilakukan analisis bibliometrik terhadap 108 artikel terpilih (39 artikel tentang moral, 30 artikel tentang Pancasila dan 34 artikel tentang SJT) dari jurnal yang terindeks Scopus, Web of Science, dan SINTA 1–2, menggunakan perangkat lunak VOSviewer.



Gambar 1. Network visualization penelitian tentang moral, Pancasila, dan SJT

Hasil *network visualization* menunjukkan bahwa kata kunci dalam literatur yang dianalisis membentuk empat klaster utama:

1. Klaster 1 terdiri dari kata kunci yang berkaitan erat dengan teori moral klasik, seperti *moral judgment*, *moral development*, dan *moral competence*. Klaster ini mencerminkan landasan teoretik yang banyak digunakan dalam pengukuran moral, khususnya yang berbasis pendekatan kognitif dan disposisional. Kemunculan kata *validity* dalam klaster ini juga menunjukkan bahwa aspek validitas psikometrik menjadi perhatian penting dalam pengembangan instrumen moral.
2. Klaster 2 terdiri dari kata kunci yang berkaitan dengan pendekatan moral berbasis teori *moral foundations*, seperti *moral foundations questionnaire* (MFQ) dan *ideology*. Klaster ini berfokus pada dimensi pengukuran nilai moral melalui konstruk ideologis dan psikososial, serta memperlihatkan dominasi penggunaan instrumen seperti MFQ dalam pengukuran moral yang menekankan pada pengaruh intuisi atau konteks budaya.
3. Klaster 3 merupakan klaster yang berakar pada konteks Indonesia, berisi kata kunci seperti pancasila. Keberadaan klaster ini mengindikasikan bahwa diskursus mengenai nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian dari kajian akademik, meskipun masih tampak terpisah dari teori moral universal maupun pendekatan asesmen berbasis SJT. Hal ini menunjukkan adanya orientasi khas Indonesia yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam pendekatan pengukuran moral secara global.

4. Klaster 4 terdiri dari kata kunci seperti *situational judgment test* dan *integrity*. Klaster ini mencerminkan pemanfaatan SJT dalam pengukuran kompetensi non-kognitif dalam berbagai konteks, seperti pendidikan profesi dan pengembangan karakter. Meski SJT telah banyak digunakan di berbagai bidang, keterkaitannya dengan nilai-nilai ideologis seperti Pancasila belum banyak ditemukan dalam literatur yang dianalisis.

Keempat klaster tersebut menunjukkan masih adanya fragmentasi konseptual antara teori moral, nilai Pancasila, dan pendekatan SJT. Titik temu antar klaster tampak melalui kata *measurement*, yang menjadi penghubung antara ketiga domain tersebut. Hal ini menjadi indikasi perlunya penelitian lanjutan untuk membangun jembatan konseptual dan metodologis yang belum terintegrasi dalam literatur sebelumnya.

Selanjutnya untuk memperkuat *posisioning* dari penelitian ini, berikut ini disajikan tabel daftar pengembangan instrumen pengukuran moral dan Pancasila berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu.

Tabel 1. Perkembangan instrumen pengukuran moral

No.	Peneliti	Instrumen	Bentuk	Kegunaan
1.	Kohlberg dalam Arslan (2021)	<i>Moral Dilemma Questionnaire</i>	Wawancara tertulis	- Mengukur tingkat perkembangan moral - Berdasarkan enam tahapan perkembangan moral secara hierarkis.
2.	James Rest dalam (Agrawal et al., 2020; Choi et al., 2020; van den Enden et al., 2019)	<i>Defining Issues Test-1</i> (DIT-1 dan DIT-2)	Kuisoner	- Mengukur tingkat penalaran moral berdasarkan preferensi terhadap prinsip moral - Skoring menggunakan proporsi pemilihan alasan prinsipil dan penolakan alasan personal dalam menyikapi dilema moral
3.	Lind dalam (Kriaučiūniene & Lind, 2021b; Lind,	<i>Moral Judgment Test</i> (MJT) dan <i>Moral</i>	Kuisoner	- Mengukur kemampuan seseorang menilai argumen moral secara

No.	Peneliti	Instrumen	Bentuk	Kegunaan
	2019; Reinicke, 2017)	<i>Competence Test (MCT)</i>		konsisten berdasarkan prinsip moral - Menggunakan dilema moral yang diikuti oleh penilaian atas argumen pro dan kontra
4.	Lennick dan Kiel dalam (Letić & Lungulov, 2020; Mohammadi et al., 2020; Toprak & Karakus, 2018)	<i>Moral Competence Inventory (MCI)</i>	Penilaian diri	- Mengukur keselarasan perilaku seseorang dengan prinsip universal yang tercermin dalam kompetensi moral - kompetensi utama yaitu integritas, tanggung jawab, kasih sayang, dan pengampunan dalam konteks organisasi.
5.	Haidt dalam (Ciuk, 2018; Dogruyol et al., 2024; Nilsson, 2023)	<i>Moral Foundations Questionnaire (MFQ)</i>	Kuisoner	- Mengukur penghargaan seseorang terhadap enam fondasi moral: <i>care/harm, fairness/cheating, loyalty/betrayal, authority/subversion, sanctity/degradation, dan liberty/oppression.</i> - Terdiri dari dua bagian: (1) pertanyaan tentang pentingnya pertimbangan moral tertentu, dan (2) tingkat persetujuan terhadap pernyataan moral.
6.	Han et al. (2020)e4	<i>Behavioral Defining Issues Test (bDIT)</i>	Kuisoner	- Mengukur perkembangan penalaran moral - Sekaligus mengumpulkan data perilaku yaitu waktu reaksi dalam pengambilan keputusan moral.
7.	Harper & Rhodes (2021)	<i>Moral Foundations Questionnaire</i>	Kuisoner	- Versi revisi dari MFQ yang terdiri dari 41 item dan menghasilkan tiga faktor utama

No.	Peneliti	Instrumen	Bentuk	Kegunaan
		– revised (MFQ-r)		(<i>traditionalism, compassion, liberty</i>).
8.	Brugman et al. (2023)	<i>Sociomoral Reflection Measure – Short Form Objective</i> (SRM-SFO)	Wawancara tertulis	- Mengukur kematangan penalaran moral dan evaluasi terhadap nilai moral - Terdiri dari 10 set pertanyaan, dengan skoring berdasarkan pilihan alasan dan tingkat kepentingan nilai.
9.	(Bafadal et al., 2024)	<i>Bafadal's Leadership Morality Questionnaire</i> (BLMQ)	Kuisoner	- Mengukur moralitas kepemimpinan kepala sekolah dasar di Indonesia - Terdiri dari tiga dimensi, (1) moral spiritual, (2) moral kebangsaan, dan (3) moral kemanusiaan.
10.	Iyer dalam Costa & Moreira (2024) dan de Buck & Pauwels (2023)	<i>Moral Foundations Sacredness Scale</i> (MFSS)	Kuisoner	Mengukur sejauh mana seseorang menganggap nilai moral sebagai “sakral” ditinjau dari kesediaan menerima uang untuk melanggar prinsip moral.

Tabel 2. Perkembangan instrumen pengukuran Pancasila

No.	Peneliti	Instrumen	Bentuk	Kegunaan
1.	Suhendi et al. (2021)	Survei Karakter Profil Pelajar Pancasila	Kuisoner	Mengukur karakter siswa berdasarkan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari asesmen nasional.
2.	Hidayah & Setiawati (2022)	Penilaian Karakter Berbasis Budaya Sekolah	<i>Self-assessment</i>	Mengukur 6 aspek karakter siswa SMP (religiositas, toleransi, kejujuran, kesantunan, kepedulian, nasionalisme)
3.	Revalina et al., (2023)	Degradasi moral siswa berdasarkan Pancasila	Wawancara	Mengukur degradasi moral siswa SMP dan faktor yang mempengaruhinya

No.	Peneliti	Instrumen	Bentuk	Kegunaan
				berdasarkan indikator nilai-nilai pada Pancasila
4.	Supramono & Hidayati (2023)	Penilaian Profil Pelajar Pancasila	<i>self-assessment</i>	Mengukur 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila (iman-taqwa, kebinekaan global, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas) untuk siswa SD
5.	Mistiani et al. (2024)	Penilaian Karakter Pelajar Pancasila	Kuisoner	Mengukur enam aspek karakter Pelajar Pancasila (iman dan takwa, kebinekaan global, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas) untuk siswa SMA.
6.	Rachman et al. (2024)	Tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (KT P5)	Kuisoner	Mengidentifikasi preferensi siswa SMP terhadap 7 tema proyek P5 (<i>nurture their spirit and body, local wisdom, engineering and technology, voice of democracy, sustainable lifestyle, unity in diversity, entrepreneurship</i>)
7.	Wahyuni et al. (2024)	Penilaian Profil Pelajar Pancasila	<i>Situational Judgment Test</i>	Mengukur 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila melalui skenario kehidupan nyata siswa SMA
8.	Nurchaya et al. (2025)	Dimensi MCI berbasis Pancasila	Penilaian diri	Mengukur perilaku seseorang selaras dengan sebagian prinsip moral Pancasila, terutama yang belum terakomodir dalam dimensi MCI asli.
9.	Ridwan et al. (2025)	Pancasila Student Character Learning Environment Inventory (PCLEII)	Skala Inventori	Skala frekuensi dan skala sikap untuk mengukur persepsi siswa SMA terhadap lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila.

Tabel 3. Perkembangan instrumen dengan bentuk SJT

No.	Peneliti	Instrumen	Domain	Respon
1.	(Aldrup et al., 2020)	TRUST (Test of Regulation in and Understanding of Social Situations in Teaching)	Kompetensi sosial-emosional guru	Peserta menilai seberapa efektif opsi atau alternatif dalam membantu mereka merasa lebih baik (regulasi emosi dan manajemen hubungan).
2.	Fisher et al. (2021)	MD-SJT	<i>Moral disengagement</i> di tempat kerja	Peserta menilai tingkat persetujuan terhadap pernyataan respon yang menggambarkan mekanisme moral disengagement
3.	Littlepage et al. (2021)	Teamwork SJT	Kemampuan menerapkan proses <i>teamwork</i> secara efektif dalam lingkungan kerja.	Peserta memberikan penilaian tingkat kemungkinan mereka terhadap setiap tindakan yang diusulkan dalam situasi yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan proses teamwork
4.	Nisa et al. (2022)	Continuous Learning Competency-SJT	Kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku belajar yang berkelanjutan dan adaptif dalam konteks pekerjaan, khususnya dalam industri listrik	Setiap item terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian skenario kerja. Bagian kedua berisi tiga pilihan perilaku yang harus dipilih oleh peserta. Peserta diminta memilih perilaku yang paling tepat/menguntungkan dan yang paling tidak tepat/menguntungkan.
5.	Aylott et al. (2023)	SJT-profesionalisme layanan kesehatan mental	Kompetensi terkait pengambilan keputusan yang profesional, refleksi kritis,	Peserta menilai benar/salah, baik/buruk suatu respon terhadap situasi tertentu yang berkaitan dengan

No.	Peneliti	Instrumen	Domain	Respon
			dan penerapan nilai-nilai dalam situasi klinis.	profesionalisme tenaga kesehatan
6.	Delellis et al. (2023)	PAD-S (<i>Pharmacy Affective Domain Situational Judgment Test</i>)	Mengukur aspek-aspek terkait keterampilan pribadi dan profesional seperti empati, profesionalisme, integritas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam konteks praktik farmasi	Peserta diminta memilih tindakan terbaik dan tindakan paling tidak efektif untuk situasi yang diberikan. Terdapat dua metode penilaian yang dieksplorasi yaitu, (1) memberikan satu poin untuk setiap respon yang benar-benar dipilih sebagai tindakan paling efektif dan paling tidak efektif, dan (2) memberikan satu poin untuk setiap respon yang dipilih secara benar pada kedua kategori tersebut
7.	Smith et al. (2023)	SJT Empati, Integritas, Kerja Sama	Atribut profesional, seperti empati, integritas, dan kerjasama, dari mahasiswa farmasi	Peserta menilai tingkat kesesuaian dari respons terhadap skenario yang disajikan
8.	Kim & Hauenstein, (2024)	EAA-SJT	Pola sikap prejudis terhadap EAAs dalam konteks sosial dan dunia kerja	Peserta menilai seberapa besar kemungkinan mereka akan melakukan tindakan tertentu melalui respon terhadap perilaku mikroagresi dalam skenario (menentang, menghindar, atau mendukung)
9.	Obi et al. (2024)	SJT Kompetensi Perilaku	Kompetensi perilaku penting dalam praktik medis mahasiswa nigeria	Peserta mengurutkan pilihan respons berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan situasi

Berdasarkan tabel yang disajikan, diketahui pengukuran moral telah lama didominasi oleh pendekatan berbasis teori perkembangan moral kognitif. Keterbatasan umum dari instrumen-instrumen tersebut terletak pada minimnya ekspresi moral pribadi karena menilai argumen moral dari pihak ketiga atau aktor dalam skenario. Selain itu, skenario yang dibangun berdasarkan konteks kehidupan masyarakat barat sehingga rentan bias sosial apabila diterapkan pada budaya lain. Sementara pengukuran moral yang berbasis pada moral intuisi dan moral universal, menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas struktur antar budaya, sehingga dimensi dari teori moral yang diusulkan seringkali kurang stabil secara statistik pada masyarakat tertentu.

Di sisi lain, instrumen-instrumen pengukuran karakter Pancasila yang telah dikembangkan, umumnya bersifat deklaratif dan berbasis persepsi diri. Beberapa bahkan hanya mengukur preferensi tema atau aktivitas, bukan aspek moralnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengukuran nilai-nilai Pancasila masih mengandalkan asumsi normatif. Sementara itu, penelitian dari Wahyuni et al. (2024) menjadi pelopor dalam penggunaan SJT untuk mengukur karakter siswa SMA di Indonesia berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Instrumen tersebut mendukung proses penilaian pengambilan keputusan karena menyertakan skenario atau situasi yang menggambarkan konteks nyata sebagai stimulus. Namun demikian belum menggambarkan kompetensi moral peserta yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam situasi dilema.

Selanjutnya, perkembangan instrumen dengan bentuk SJT secara global menunjukkan efektifitas dalam mengukur berbagai kompetensi, seperti profesionalisme, kerja sama tim, integritas, empati, *moral disengagement*, hingga kompetensi sosial dan emosional. SJT dinilai mampu merepresentasikan kompleksitas situasi nyata melalui skenario berbasis dilema yang menuntut penilaian terhadap berbagai alternatif tindakan. Meskipun demikian, sebagian besar instrumen dengan bentuk SJT tersebut, belum mengaitkan skenario dilema dengan kompetensi moral Pancasila.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memposisikan diri secara strategis sebagai penghubung di antara ketiga domain. Instrumen dengan bentuk

SJT yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk mengukur kompetensi moral berdasarkan respons terhadap skenario atau situasi dilema, dengan dimensi nilai-nilai Pancasila sebagai konteks dilema. Berbagai respon terhadap skenario dilema tersebut, dirancang berdasarkan teori perkembangan moral, sehingga memberikan informasi mengenai perkembangan moral peserta.

